
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL KOTA GORONTALO

Meilan Abas

Pembimbing 1 Dr.Bala Bakri, SE., MM

Pembimbing 2 Rizka Yunika Ramly, SE., M.AK

Akuntansi/Ekonomi, universitas Ichsab Gorontalo

Meilanabas@gmail.com

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah ditinjau dari laporan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo. Objek penelitian ini Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggarantahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio varians pendapatan di tahun 2016 nilai rasio sebesar 21%, tahun 2017 senilai 73% dan tahun 2018 senilai 8%. Untuk analisis rasio efektivitas di tahun 2016 nilai rasio sebesar 21%, tahun 2017 senilai 73% dan tahun 2018 senilai 8%. Kemudian rasio varians belanja pada tahun 2016 sebesar 85%, tahun 2017 sebesar 96% dan tahun 2018 sebesar 75%. Kemudian pada analisis belanja operasi pada tahun 2016 nilai rasio sebesar 18%, tahun 2017 senilai 24% dan tahun 2018 senilai 43%. Dan dilihat dari analisis belanja modal nilai rasio pada tahun 2016 sebesar 82%, tahun 2017 sebesar 75% dan tahun 2018 senilai 56%. Dan analisis rasio efisiensi belanja yang pada tahun 2016 senilai 85%, tahun 2017 senilai 96% dan tahun 2018 senilai 75, sehingga untuk rasio efisiensi secara keseluruhan dalam kategori yang efisien.

Kata Kunci : Rasio Analisis Pendapatan dan Rasio Analisis Belanja

Abstract, This study aims to determine the government's financial performance in terms of budget realization reports at the Public Works Office and Kimpraswil of Gorontalo City. The object of this research is the Analysis of Regional Government Financial Performance in terms of the Budget Realization Report at the Gorontalo City Public Works Office and Kimpraswil using qualitative methods and descriptive analysis, the data used in this study are budget realization report data from 2016 to 2018. The results show that the income variance ratio in 2016 the value ratio was 21%, 2017 was 73% and 2018 was 8%. For effectiveness ratio analysis in 2016, the ratio value was 21%, 2017 was 73% and 2018 was 8%. Then the ratio of variance of spending in 2016 was 85%, in 2017 it was 96% and in 2018 it was 75%. Then in the analysis of operating expenditures in 2016 the ratio value was 18%, in 2017 it was 24% and in 2018 it was 43%. And seen from the analysis of capital expenditure the ratio value in 2016 was 82%, 2017 was 75% and in 2018 was 56%. And the analysis of the expenditure efficiency ratio in 2016 was 85%, 2017 was 96% and 2018 was 75, so that the overall efficiency ratio is in the efficient category.

Keywords: Revenue Analysis Ratio and Expenditure Analysis Ratio

Pendahuluan

Latar Belakang Penelitian

Beberapa agenda padareformasi total di Indonesia adalah terciptanya good governance secara menyeluruh dalam rangka membentuk Indonesia baru. Harus diakui bahwa saat ini good governance sudah menjadi tuntutan bagi bangsa Indonesia. Salah satu agenda reformasi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah reformasi manajemen keuangan sebagai upaya untuk mewujudkan good governance di dalam pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah. Sehubungan dengan adanya reformasi, pemerintah telah mengeluarkan dua

undang-undang yang sangat penting artinya dalam sistem pemerintahan pusat, daerah, dan dalam sistem hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Kedua undang-undang tersebut adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah, telah diubah menjadi UU No. 32 dan 33 tahun 2004. Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi dalam usaha pembangunan perlu dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga pemberian otonomi dan desentralisasi di bidang keuangan perlu ditempuh agar usaha pembangunan dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut melakukan tugasnya dengan baik dan transparan. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah diberi keluluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri.

Menurut Bastian (2010) dengan adanya otonomi daerah pemerintah diberi keluluasaan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggung jawabkan kepada masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas. Pertanggung jawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan media tertentu.

Salah satu alat untuk memfasilitasi tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif yaitu laporan keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang

terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas, Mardiasmo (2009). Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Halim (2013:150) mengatakan bahwa pengukuran kinerja dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, debt service coverage ratio dan rasio pertumbuhan. Jadi analisa kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, membantu menungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Menurut Mardiasmo (2009) terselenggaranya *Good Governance* merupakan adalah salah satu persyaratan bagi pemerintah dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Reformasi pengelolaan keuangan daerah sendiri diawali dengan adanya tuntutan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Guna mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik. Reformasi manajemen sektor publik harus dan sangat ditentukan oleh reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Implikasi adanya otonomi daerah dan daerah otonom yang berdasarkan asas desentralisasi telah memberikan dampak positif bagi daerah. Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pemekaran daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang hampir terjadi diseluruh Indonesia.

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini dilihat dari laporan realisasi anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil di Kota Gorontalo. Dalam tiga tahun terakhir berturut-turut Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo ini tidak dapat mencapai realisasi penerimaan asli daerah yang telah ditargetkan oleh pemerintah daerah. Bahkan sangat jauh dari nilai target yang diharapkan. Tujuan dari tercapainya pendapatan asli daerah adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, serta diharapkan mempercepat pelaksanaan pembangunan. Berikut dilampirkan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil di Kota Gorontalo.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo

| .URAIAN | ANGGARAN | | | REALISASI | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| PAD | 422.000.000 | 412.000.000 | 432.000.000 | 90.381.321 | 302.018.525 | 32.787.146 |
| Belanja | 96.287.169.213 | 65.624.285.957 | 71.133.211.189 | 82.004.944.226 | 63.243.222.153 | 53.592.485.589 |
| Belanja Tdk Langsung | 4.996.632.764 | 5.247.749.736 | 5.379.256.407 | 4.720.528.210 | 4.930.698.624 | 4.858.379.247 |
| Belanja Langsung | 91.290.536.449 | 60.376.536.221 | 65.753.954.782 | 77.284.416.016 | 58.312.523.529 | 48.734.106.342 |
| Belanja Operasi | 17.125.574.928 | 16.338.006.422 | 27.600.613.847 | 15.005.456.547 | 15.701.970.416 | 23.344.431.814 |
| Belanja Modal | 79.161.594.285 | 49.286.279.535 | 43.532.597.342 | 66.999.487.679 | 47.541.251.737 | 30.248.053.775 |

Sumber: LRA - Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi dalam tiga tahun berturut-turut sangat jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kota Gorontalo. Anggaran yang ditetapkan pendapatan asli daerah di 2016 berjumlah Rp. 422.000.000,- sedangkan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 90.381.321,-. Di tahun 2017 pendapatan asli daerah berjumlah Rp. 412.000.000,- realisasinya hanya sebesar Rp. 302.018.525,-. Sama halnya dengan tahun-tahun kemarin, pada 2018 anggaran pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp. 432.000.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 32.787.146,-. Dari rincian pendapatan asli daerah tersebut terlihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo belum bekerja secara optimal. Berdasarkan fenomena tersebut diatas, penulis mengambil

formulasi judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo”.

Pengertian Kinerja

Seperti yang telah dikemukakan oleh Bastian (2010) yang mengatakan bahwa secara etimologis, kinerja berasal dari kata dasar kerja yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan,.

Menurut Mahsun (2006), kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Sedangkan menurut (Sujarweni,2015) kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut (Wibowo,2016) kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dengan pekerjaan tersebut atau tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Menurut Hidayat dan Ghozali, (2013) bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggung jawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan.

Analisis kinerja keuangan dilakukan pada dasarnya untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan analisis-analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2013) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD adalah analisis rasio keuangan. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, derajat kontribusi BUMD, debt service coverage ratio, rasio utang terhadap pendapatan daerah, rasio tingkat pembiayaan SiLPA. Pada penelitian ini rasio yang digunakan adalah derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan tingkat pembiayaan SiLPA. Untuk itu, penjelasan terkait hanya pada derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan tingkat pembiayaan SiLPA.

Kriteria Dan Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2009:121), tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Mardiasmo (2009) pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

- 1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Sedangkan Halim (2013) menjelaskan bahwa pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam:

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut ini adalah data atau perkiraan-perkiraan yang relevan dengan kedua rasio yang digunakan dalam penelitian ini, yakni rasio Analisis Pendapatan dan rasio Analisis Belanja yang akan dianalisis dalam penelitian ini, seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran
untuk Pos Pendapatan dan Belanja
Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo
Tahun 2016 s/d Tahun 2018

| .URAIAN | ANGGARAN | | | REALISASI | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| PAD | 422.000.000 | 412.000.000 | 432.000.000 | 90.381.321 | 302.018.525 | 32.787.146 |
| Belanja | 96.287.169.213 | 65.624.285.957 | 71.133.211.189 | 82.004.944.226 | 63.243.222.153 | 53.592.485.589 |
| Belanja Tdk Langsung | 4.996.632.764 | 5.247.749.736 | 5.379.256.407 | 4.720.528.210 | 4.930.698.624 | 4.858.379.247 |
| Belanja Langsung | 91.290.536.449 | 60.376.536.221 | 65.753.954.782 | 77.284.416.016 | 58.312.523.529 | 48.734.106.342 |
| Belanja Operasi | 17.125.574.928 | 16.338.006.422 | 27.600.613.847 | 15.005.456.547 | 15.701.970.416 | 23.344.431.814 |
| Belanja Modal | 79.161.594.285 | 49.286.279.535 | 43.532.597.342 | 66.999.487.679 | 47.541.251.737 | 30.248.053.775 |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil

Analisis kinerja keuangan pada pemerintah daerah merupakan informasi yang penting karena penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat di jadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi yang bersangkutan. Indikator dari rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan dan analisis belanja.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pada Analisis Pendapatan dapat disimpulkan untuk rasio varians pendapatan di tahun 2016 nilai rasio sebesar 21%, tahun 2017 senilai 73% dan tahun 2018 senilai 8%. Untuk analisis rasio efektivitas di tahun 2016 nilai rasio sebesar 21%, tahun 2017 senilai 73% dan tahun 2018 senilai 8%.. sehingga dapat disimpulkan untuk rasio analisis pendapatan secara keseluruhan termasuk dalam kriteria yang kurang baik karena tidak memenuhi standar kriteria penilaian yang baik.
2. Pada analisis belanja dapat disimpulkan untuk rasio varians belanja pada tahun 2016 sebesar 85%, tahun 2017 sebesar 96% dan tahun 2018 sebesar 75%. Kemudian pada analisis belanja operasi pada tahun 2016 nilai rasio sebesar 18%, tahun 2017 senilai 24% dan tahun 2018 senilai 43%. Dan dilihat dari analisis belanja modal nilai rasio pada tahun 2016 sebesar 82%, tahun 2017 sebesar 75% dan tahun 2018 senilai 56%. Sehingga secara keseluruhan rasio analisis varians belanja memiliki kriteria penilaian yang tidak baik karena dari rasio varians belanja, rasio belanja operasi dan belanja modal secara keseluruhan tidak mencapai kriteria penilaian yang baik. Terkecuali pada analisis rasio efisiensi belanja yang pada tahun 2016 senilai 85%, tahun 2017 senilai 96% dan tahun 2018 senilai 75, sehingga untuk rasio efisiensi secara keseluruhan dalam kategori yang efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Anggraini, Yunita dan Puranto Hendra. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja; Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat.

Fitriyah Agustin. (2007). *“Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.

Hairunisya, Nanis. 2008. *Penilaian Kinerja Bagian Keuangan Pemkab Probolinggo Menggunakan Analisis Rasio Keuangan*, Jurnal Ekonomika Vol. 2, No. 2 Desember 2008.

Hendro Sumarjo. (2010). *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.”* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sugiyono, 2015. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung :Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna, 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Wibowo, 2016. *Manajemen Kinerja*. Edisi Kelima. Jakarta : PT. Raja Grasindo Persada.